



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS UDAYANA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MADE SUCIPTA
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN, KERJA SAMA DAN INFORMASI
3. NHK : 234393

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.100.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/100 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 485 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
3. Tanah Seluas 100 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
4. Tanah Seluas 100 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **271.000.000**

1. MOTOR, HONDA PCX 150 SEPEDA MOTOR Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 150 SEPEDA MOTOR Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
4. MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
5. MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **90.300.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	110.834.322
F. HARTA LAINNYA	Rp.	35.201.828
Sub Total	Rp.	1.607.336.150
III. HUTANG	Rp.	24.616.163
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.582.719.987

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.